



RENJA

Rencana Kerja
PERUBAHAN
Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat
Tahun 2024



DINAS PARIWISATA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jalan Sutan Syahrir No.02A Telepon (0532) 25002 Fax (0532) 27520
PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH 74112

KATA PENGANTAR

Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja penyesuaian bagi aparatur Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berisikan 5 program dan 16 kegiatan.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk perubahan dalam rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap terjadinya perubahan kebutuhan, pemenuhan anggaran, dan perbaikan pencapaian target.

Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mencapai target yang lebih tinggi, dan memperbaiki kualitas kerja. Renja Perubahan akan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, untuk mencapai target. Dengan adanya RENJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA, semua pihak yang terlibat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam perubahan dapat bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, Juli 2024



**Pit. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Drs. EDIE FAGANTI
NIP. 19650802 199403 1 010**

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Kata Pengantar.....	1
Daftar isi.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024.....	13
2 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata.....	13
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	20
3.1. Rencana Kerja Pendanaan perangkat daerah.....	20
BAB IV. PENUTUP.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RENJA perangkat daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, proses penyusunan RENJA PD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu : tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal RENJA PD dengan berpedoman pada RENSTRA PD, hasil evaluasi RENJA PD tahun lalu dan hasil evaluasi RENJA tahun berjalan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai satu urusan satuan kerja teknis dalam satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu urusan pilihan Pariwisata, yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Renstra dan Renja SKPD demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap terjadinya perubahan kebutuhan, pemenuhan anggaran, dan perbaikan pencapaian target. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mencapai target yang lebih tinggi, dan memperbaiki kualitas kerja. Renja Perubahan akan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan efektivitas organisasi.

Dalam menyusun rencana kerja dinas pariwisata diperlukan langkah-langkah terencana, terarah, terprogram, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, output, outcome dan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah untuk itu perlu keterlibatan semua pihak dalam mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum penyusunan renja, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;

31. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, anggaran dan pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata. Adapun tujuan rencana kerja perubahan tahun 2024 adalah menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam sisa waktu 6 (enam) bulan kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. Renja ini digunakan untuk menilai kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan substansi sajian tersebut di atas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Kerja Pendanaan perangkat daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN II DINAS PARIWISATA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Dinas Pariwisata Tahun 2024

Evaluasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun 2024 terlaksana secara keseluruhan, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota;

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

Program Pemasaran Pariwisata;

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan
Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif.

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan tahun 2024. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan DPA Dinas Pariwisata yang dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 5 program dan 16 kegiatan, dengan realisasi fisik 35,08 % dan realisasi keuangan 30,74 %.

Realisasi program baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan sementara secara rinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik 60,51 % dan realisasi keuangan 54,62 % ;
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, realisasi fisik 17,56 % dan realisasi keuangan 14,42 % ;

3. Program Pemasaran Pariwisata, realisasi fisik 52,41 % dan realisasi keuangan 47,01 % ;
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, realisasi fisik 17,93 % dan realisasi keuangan 10,46 % ;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, realisasi fisik 4,19 % dan realisasi keuangan 1,04 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 15.802.990.60,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.857.151.178,- atau 30,74%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 35,08%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan sampai dengan triwulan II seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja TW II Tahun 2024	Realisasi Kinerja TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja TW II Tahun 2024 (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	32%	32%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	7 Dok	58%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	1 Dok	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dok	0 Dok	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dok	0 Dok	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dok	0 Dok	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	3 Lap	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Lap	2 Lap	50%

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dok	2 Dok	67%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/bln	32 Org/bln	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	1 Dok	0 Dok	0%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dok	0 Dok	0%
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan	1 Dok	0 Dok	0%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	3 Dok	1 Dok	33%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dok	1 Dok	50%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	0 Paket	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Org	5 Org	63%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dok	3 Dok	60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Lap	9 Lap	60%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Dok	2 Dok	50%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 Unit	0 Unit	0%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dok	1 Dok	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	2 Lap	50%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Lap	0 Lap	0%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Dok	0 Dok	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	0 Unit	0%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0 Unit	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	28 Unit	0 Unit	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0%
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase obyek wisata baru yang dikembangkan	13%	0%	0%
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 Dok	0 Dok	0%
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan daya tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota	1 Dok	0 Dok	0%
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata Baru	3 Obyek	0 Obyek	0%
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Lokasi	0 Lokasi	0%
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 Dok	0 Dok	0%
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	6 Unit	0 Unit	0%
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	6 Lokasi	0 Lokasi	0%
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	6 Lap	4 Lap	67%

	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Yang Ditetapkan	5 Usaha	0 Usaha	0%
	Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yang terverifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	5 Usaha	0 Usaha	0%
	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	2 Lap	0 Lap	0%
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	1,5%	0%	0%
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40 Event	5 Event	13%
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	1 Dok	0 Dok	0%
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	4 Keg	3 Keg	75%
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	1 Promosi	1 Promosi	100%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif	10%	0%	0%
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	50 Org	50 Org	100%
	Fasilitasi Pemberian Insentif	Jumlah insentif yang diberikan	24 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	54%

	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	12 Produk	13 Produk	108%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11%	0%	0%
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	100 Org	0 Org	0%
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	4 Lap	0 Lap	0%
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI	Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	45 Org	80 Org	178%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	150 Org	140 Org	93%
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Lap	0 Lap	0%
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Keg	0 Keg	0%
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	40 Org	0 Org	0%

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dalam lampiran. Rangkuman rencana program kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

No. Rek	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
				Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Target Capaian	Satuan	Sumber Dana	Anggaran	Target Capaian	Satuan	Anggaran	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah			100	%	APBD	6.278.938.660	100	%	6.775.019.160
3.26.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	13	Dok	APBD	94.301.400	13	Dok		68.785.200
3.26.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	2	Dok	APBD	46.828.200	2	Dok		11.250.000
3.26.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	2.186.000	1	Dok		5.336.000
3.26.01.2.01.0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	2.186.000	1	Dok		5.336.000
3.26.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	1.894.000	1	Dok		3.100.000
3.26.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	1.894.000	1	Dok		4.450.000

3.26.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	3	Laporan	APBD	37.843.200	3	Laporan	37.843.200
3.26.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	4	Laporan	APBD	1.470.000	4	Laporan	1.470.000
3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	3	Dok	APBD	4.769.462.000	3	Dok	4.844.422.000
3.26.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	32	Orang/bulan	APBD	4.714.447.000	32	Orang/bulan	4.801.422.000
3.26.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	4.000.000	1	Dok	7.000.000
3.26.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Laporan	APBD	51.015.000	1	Laporan	36.000.000
3.26.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	19.885.449	1	Dok	19.885.449
3.26.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	19.885.449	1	Dok	19.885.449
3.26.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	42.207.750	1	Dok	42.207.750
3.26.01.2.04.0004			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	3	Dok	APBD	42.207.750	3	Dok	42.207.750

3.26.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	2	Dok	APBD	114.448.000	2	Dok	147.032.000
3.26.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Paket	APBD	20.400.000	1	Paket	20.400.000
3.26.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	8	Org	APBD	94.048.000	8	Org	126.632.000
3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	5	Dok	APBD	232.484.437	5	Dok	334.395.072
3.26.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Paket	APBD	8.155.250	1	Paket	8.155.250
3.26.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Paket	APBD	48.834.318	1	Paket	53.834.318
3.26.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Paket	APBD	11.250.000	1	Paket	11.250.000
3.26.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Paket	APBD	14.244.869	1	Paket	14.244.869
3.26.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	15	Laporan	APBD	150.000.000	15	Laporan	246.910.635
3.26.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	4	Dok	APBD	562.481.097	4	Dok	760.907.862
3.26.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Unit	APBD	442.333.920	1	Unit	442.333.920

3.26.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	5	Unit	APBD	19.425.000	5	Unit	106.262.000
3.26.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	14	Unit	APBD	100.722.177	27	Unit	212.311.942
3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	2	Dok	APBD	232.983.600	2	Dok	253.146.900
3.26.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	4	Laporan	APBD	90.598.800	4	Laporan	148.992.300
3.26.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Laporan	APBD	142.384.800	1	Laporan	104.154.600
3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	5	Dok	APBD	210.684.927	5	Dok	304.236.927
3.26.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Unit	APBD	23.385.000	1	Unit	13.385.000
3.26.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	7	Unit	APBD	21.381.500	7	Unit	21.381.500
3.26.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	28	Unit	APBD	18.840.000	28	Unit	22.392.000
3.26.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	2	Unit	APBD	114.932.827	2	Unit	214.932.827
3.26.01.2.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Unit	APBD	32.145.600	1	Unit	32.145.600

3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Prosentase obyek wisata baru yang dikembangkan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	13	%	APBD dan APBN	6.361.172.000	13	%	6.846.052.000
3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo			APBD	515.000.000			515.000.000
3.26.02.2.01.0009			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan daya tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	515.000.000	1	Dok	515.000.000
3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Wisata Baru	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	3	Obyek	APBD dan APBN	5.806.172.000	3	Obyek	6.331.052.000
3.26.02.2.03.0001			Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Lokasi	APBD	18.362.300	1	Lokasi	18.362.300
3.26.02.2.03.0002			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	1	Dok	APBD	41.538.200	1	Dok	41.538.200
3.26.02.2.03.0004			Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	15	Unit	APBD dan APBN	5.365.327.650	15	Unit	5.865.327.650
3.26.02.2.03.0007			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	6	Lokasi	APBD	349.943.850	6	Lokasi	349.943.850
3.26.02.2.03.0010			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	6	Laporan	APBD	31.000.000	6	Laporan	55.880.000
3.26.02.2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar Usaha Yang Ditetapkan	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	5	Usaha	APBD	40.000.000	5	Usaha	0
3.26.02.2.04.0010			Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yang terverifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	5	Usaha	APBD	20.000.000	5	Usaha	0

3.26.02.2.04.0011			Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Kab. Ktw. Brt., Arut Selatan, Madurejo	2	Laporan	APBD	20.000.000	2	Laporan	0
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	Kab. Ktw. Brt.	1,50	%	APBD	949.690.700	1,50	%	1.230.002.540
3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Event Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw. Brt.	40	Event	APBD	949.690.700	40	Event	1.230.002.540
3.26.03.2.01.0003			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Kab. Ktw. Brt.	1	Dok	APBD	50.000.000	1	Dok	125.311.840
3.26.03.2.01.0006			Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Kab. Ktw. Brt.	4	Keg	APBD	779.874.500	4	Keg	984.874.500
3.26.03.2.01.0007			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Kab. Ktw. Brt.	1	Promosi	APBD	119.816.200	1	Promosi	119.816.200
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw. Brt.	10	%	APBD	429.642.636	10	%	702.284.176
3.26.04.2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw. Brt.	50	Orang	APBD	429.642.636	50	Orang	702.284.176
3.26.04.2.02.0011			Fasilitasi Pemberian Insentif	Jumlah insentif yang diberikan	Kab. Ktw. Brt.	24	Pelaku Usaha	APBD	375.642.886	24	Pelaku Usaha	460.133.846

3.26.04.2.02.0017			Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Kab. Ktw. Brt.	-	-	APBD	0	5	Promosi	187.600.580
3.26.04.2.02.0022			Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	Kab. Ktw. Brt.	12	Produk	APBD	53.999.750	12	Produk	54.549.750
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw. Brt.	11	%	APBD dan APBN	1.783.546.604	11	%	1.481.505.124
3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Kab. Ktw. Brt.	100	Org	APBD dan APBN	1.753.546.804	100	Org	1.481.505.124
3.26.05.2.01.0005			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Kab. Ktw. Brt.	4	Laporan	APBD	272.641.680	4	Laporan	0
3.26.05.2.01.0008			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI	Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	Kab. Ktw. Brt.	45	Orang	APBD dan APBN	840.873.724	205	Orang	840.873.724
3.26.05.2.01.0009			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Kab. Ktw. Brt.	150	Orang	APBD dan APBN	635.901.400	220	Orang	636.501.400
3.26.05.2.01.0011			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kab. Ktw. Brt.	1	Laporan	APBD	4.130.000	1	Laporan	4.130.000

3.26.05.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw. Brt.	2	Kegiatan	APBD	29.999.800	2	Kegiatan	0
3.26.05.2.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Kab. Ktw. Brt.	40	Orang	APBD	29.999.800	40	Orang	0

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 merupakan dokumen yang diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan dan penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan baik Pemerintah, dunia usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan 2024 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pengembangan kepariwisataan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD Perubahan tahun 2024 sebagai jabaran tahunan RPJMD 2023–2026.